



SP – 04/BKF/2023

Manufaktur Ekspansif dan Inflasi Terjaga, Pemulihan Ekonomi Berlanjut

Jakarta, 2 Februari 2023 – Di tengah dinamika perekonomian dunia, sektor manufaktur nasional konsisten ekspansif selama tujuh belas bulan berturut-turut. PMI Januari 2023 Indonesia tercatat naik menjadi 51,3 (Des 22: 50,9). “Sektor manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi menunjukkan daya tahan perekonomian Indonesia di tengah gejolak global dan perlambatan manufaktur yang terjadi di berbagai negara,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Tren ekspansif di bulan Januari 2023 juga ditunjukkan beberapa negara lain di kawasan ASEAN yaitu Filipina 53,5 (Des 22: 53,1) dan Thailand 54,5 (Des 22: 52,5). Sementara itu, Taiwan 44,3 (Des 22: 44,6), Malaysia 46,5 (Des 22: 47,8), Vietnam 47,4 (Des 22: 46,4), Korea Selatan 48,5 (Des 22: 48,2) dan Amerika Serikat 46,8 (Des 22: 46,2) tercatat masih berada di zona kontraktif.

“*Output* dan permintaan baru di Indonesia mengalami pertumbuhan tercepat dalam tiga bulan terakhir karena permintaan dalam negeri yang tetap kuat,” lanjut Febrio. Walaupun permintaan dari sisi ekspor masih agak tertahan, peningkatan permintaan domestik mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan aktivitas pembelian barang input. “Secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha di awal tahun 2023 ini meningkat dibandingkan akhir tahun lalu. Ini tercermin dari peningkatan stok barang input. Selain itu, harga barang input mengalami penurunan walaupun disrupsi pasokan masih terjadi,” jelas Febrio. Meskipun demikian, para produsen tetap mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi dunia dan cuaca ekstrim yang dianggap berpotensi menghambat laju distribusi.

Sementara itu, inflasi Januari 2023 tercatat sebesar 5,28% (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya (Des 22: 5,51% (yoy)). “Tren inflasi mulai turun perlahan, terutama dari *administered price* yang berasal dari harga bahan bakar. Pemerintah terus mengantisipasi pergerakan harga komoditas energi dan ketersediaan pasokan BBM untuk memastikan fungsi stabilisasi APBN, yaitu sebagai *shock absorber* di tengah kondisi global yang masih bergejolak,” lanjut Febrio.

Jika dilihat per kelompok, inflasi inti turun tipis ke angka 3,27% (yoy) dari 3,36% pada Desember 2022 (yoy). Kinerja inflasi ini di satu sisi berasal dari penurunan inflasi kebutuhan sandang, perumahan dan jasa layanan perumahan, serta rekreasi. Sementara di sisi lain, terjadi peningkatan inflasi pada sektor kesehatan serta perawatan

pribadi dan jasa lainnya. Inflasi inti yang masih terjaga di atas 3% menunjukkan daya beli masyarakat yang masih kuat dan optimisme menyambut tahun 2023.

Inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) sedikit meningkat menjadi 5,71% (yoy) (Des 22: 5,61% (yoy)) didorong oleh harga pangan yang cenderung *volatile* sebagai dampak faktor musiman dan gangguan cuaca. “Untuk menjamin ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui percepatan impor, antisipasi lonjakan harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri yang sudah dilakukan dari sejak awal tahun,” terang Febrio.

Untuk kelompok *administered price*, inflasi tercatat 12,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan Desember 2022 (13,34%). Hal ini didorong oleh menurunnya tarif angkutan udara dan bensin. Sementara harga rokok dan tarif air PAM mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh kenaikan tarif cukai dan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Ke depan, Pemerintah akan terus berupaya menjaga inflasi mengingat pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama yang menjadi perhatian Presiden dan telah disampaikan dalam acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023 pada 17 Januari 2023 lalu. Upaya pengendalian inflasi terus ditempuh melalui berbagai kebijakan, antara lain stabilisasi harga pangan, penguatan pasokan dan cadangan domestik, antisipasi gejolak harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). “Sinergi dan bauran kebijakan di tingkat pusat dan daerah terus dilakukan bersama Bank Indonesia untuk menjaga agar sasaran inflasi kembali pada sasaran yang ditetapkan Pemerintah,” tutup Febrio.

Narahubung Media:

Endang Larasati
Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan

☎ 021 3441484

✉ ikp.bkf@kemenkeu.go.id